

**IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI
KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN TERHADAP
PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN BANK**

TESIS

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum*



OLEH:

**RANDU HARYANDU
NIM. 2120113034**

DOSEN PEMBIMBING

1. Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M. Hum
2. Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN TERHADAP PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN BANK

(Randu Haryandu, S.H., NIM 2120113034, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Halaman 130, 2023)

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (UU Akses Informasi Keuangan) melahirkan suatu paradigma baru dalam penerapan prinsip kerahasiaan bank. UU Akses informasi keuangan telah memberikan kewenangan secara atribusi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat mengakses data wajib pajak pada bank. UU Akses Informasi Keuangan dengan metode omnibus telah mencabut beberapa ketentuan dalam UU Perbankan, membuat data wajib pajak dapat dibuka meskipun wajib pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penyidikan tindak pidana pajak. Dengan mempertimbangkan sistem perpajakan yang menganut sistem *self assesment* maka ketentuan ini perlu diteliti kesesuaian norma yang mengatur. Ketentuan ini juga memberikan implikasi hukum terhadap penerapan asas kerahasiaan bank. Namun, untuk menjamin adanya perlindungan hukum maka negara harus memberikan jaminan terhadap keamanan data nasabah bank agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implikasi dan sinkronisasi hukum UU Akses Informasi Keuangan dengan UU Perbankan dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta bentuk perlindungan hukum terhadap data nasabah dalam pelaksanaan UU Akses Informasi Keuangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yang dianalisa secara normatif kualitatif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Akses Informasi Keuangan memberikan implikasi hukum terhadap penerapan asas kerahasiaan bank dan juga terdapat kontradiksi atas pembukaan data wajib pajak pada perbankan dengan sistem *self assesment* perpajakan. Selain itu, UU Akses Informasi Keuangan tidak mengatur secara eksplisit atas perlindungan hukum terhadap data nasabah dan tidak terdapatnya sanksi, baik secara administrasi maupun pidana, bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan data-data nasabah. Perlindungan terhadap data nasabah dalam pelaksanaan akses informasi keuangan hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Keuangan, yang seharusnya Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur teknis pelaksanaan aturan undang-undang. Diharapkan di masa mendatang, pemerintah pemerintah dapat melakukan kajian dan perubahan terhadap UU Akses Informasi Keuangan agar dapat memberikan jaminan perlindungan hukum atas data-data nasabah yang diatur dalam bentuk Undang-Undang.

Kata kunci: Pajak, Bank, Rahasia Bank, Akses Informasi Keuangan

LEGAL IMPLICATION OF THE ACCESS TO FINANCIAL INFORMATION FOR TAX PURPOSES LAW ON THE APPLICATION OF THE BANK SECRECY PRINCIPLE

(Randu Haryandu, S.H., NIM 2120113034, Master of Law Program, Faculty of Law, Andalas University, Page 130, 2023)

ABSTRACT

The enactment of the Access to Financial Information for Tax Purposes Law (Access to Financial Information Law) has created a new paradigm in the application of bank secrecy principle. This Law has given the Director General of Taxes the authority by attribution to be able to access taxpayer data at the bank. The Access to Financial Information Law through omnibus method has repealed several provisions in the Banking Law, allowing access to taxpayer data at the bank even though they are not undergoing examination, collection or investigation of tax crimes. By considering Indonesia's taxation system that adheres self-assessment system, this provision needs to be scrutinized for conformity with the governing norms. This provision also has legal implications on the application of bank secrecy; thus, the state must provide legal protection for bank customer data security to avoid misuse of data by irresponsible parties. This study aims to determine and analyze the legal implications and synchronization of the Access to Financial Information Law with the Banking Law and the General Provisions and Tax Procedures Law, as well as the form of legal protection of customer data in its implementation. The research method used was a normative juridical approach, which was analyzed normatively qualitatively. The results showed that the Access to Financial Information Law had legal implications on the application of bank secrecy principle. There was also a contradiction between access to taxpayer data at the bank and the self-assessment system in taxation. In addition to that, the Access to Financial Information Law did not explicitly regulate the legal protection of customer data as there were no sanctions, either administratively or criminally, for parties who misuse the customer data. Protection of customer data in the implementation of access to financial information was only found in the Regulation of the Minister of Finance, which actually should have regulated the technical implementation of the law. Therefore, it is expected that in the future, the government can conduct a review and make amendment to the Access to Financial Information Law in order to provide a guarantee of legal protection of customer data regulated in the form of Law.

Keywords: Tax, Bank, Bank Secrecy, Access to Financial Information